

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Alasan Pemilihan Judul

Terdapat beberapa alasan penulis memilih judul “*Alasan Amerika Serikat Melakukan Terhadap Pembunuhan Jendral Qassem Soleimani*” sebagai proposal penelitian. Pertama, konsentrasi mata kuliah yang diambil oleh Penulis adalah diplomasi. Sehingga Penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai isu yang termasuk ke dalam *high politics*. Kedua, isu yang berkaitan dengan salah satu wilayah di Timur Tengah memiliki ketertarikan yang menarik untuk dibahas. Ketiga, memiliki ketersediaan data yang mendukung Penulis dalam proses penelitian ini.

1.2. Latar Belakang

Amerika Serikat dan Iran memiliki tensi hubungan yang cukup buruk dalam dunia internasional. Kedua negara tersebut seringkali memiliki konflik berkepanjangan yang tidak terselesaikan. Tensi hubungan kedua negara memanas kembali ketika diangkat nya Shah Mohammad Reza Pahlavi sebagai presiden Iran tahun 1957 dengan bantuan Amerika Serikat. Tujuan Amerika Serikat ikut turut serta dalam upaya pemilihan Reza Pahlevi yaitu untuk membuktikan hegemoni nya di kawasan Timur Tengah yang kaya akan hasil minyak. Sedangkan tujuan Iran saat itu untuk mendapat pengaruh dari negara-negara Barat yang saat itu memiliki kekuasaan di dunia internasional.

Pada Januari 1979, Ayatollah Ruholah Khomeini kembali dari pengasingannya di Irak dan memimpin upaya untuk menghapuskan monarki dan memperoklamirkan pemerintahan Islam atau disebut juga sebagai Revolusi Islam Iran. Di saat yang yang bersamaan pun telah terjadi

peristiwa penyerbuan di Kedutaan Besar Amerika di Tehran yang dilakukan oleh mahasiswa Iran dan berhasil menyandera 52 orang Amerika. Hal tersebut meyakinkan Presiden Jimmy Carter untuk memutuskan hubungan diplomatik Amerika dan Iran pada 7 April 1980. (Larasati, 2020)

Pada 22 September 1980, Irak berusaha untuk menginvasi Iran yang berada dibawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah. Adanya perang antara Iraq-Iran memberikan kekhawatiran terhadap Amerika akan aliran minyak Timur Tengah dan memastikan bahwa konflik ini tidak mempengaruhi sekutu terdekatnya yaitu, Arab Saudi. Pada konflik ini, Amerika memutuskan untuk memihak Irak dalam kepemimpinan Sadam Husein karena Irak dianggap sebagai negara yang memiliki kekuatan cukup besar di kawasan Timur Tengah.

Seorang reformis moderat, Mohammad Khatami berhasil memenangkan pemilihan presiden Iran pada bulan Agustus 1997. Pihak Amerika yang saat itu berada di bawah pemerintahan presiden Bill Clinton merasakan adanya peluang untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara tersebut. Rencana bagi hubungan diplomatic kedua negara tersebut akhirnya terealisasikan dengan baik tetapi tidak cukup maksimal karena pemimpin tertinggi Iran yang saat itu adalah Ayatollah Ali Khameni tidak setuju mengenai peningkatan hubungan antar kedua negara. (Timur, 2003) terorisme dan mengejar senjata pembunuh masal dalam pidato kenegarannya. Keadaan hubungan antar kedua negara memburuk kembali pada tahun 2002 ketika presiden George W Bush menyebut Iran, Irak, dan Korea Utara sebagai “Axis of Evil” yang mendukung terorisme dan mengejar senjata pembunuh massal dalam pidato kenegaraannya.

Hubungan antara Amerika dan Iran berangsur membaik saat Iran berada dibawah kepemimpinan Hassan Rouhani dan Amerika berada dibawah kepemimpinan presiden Barack Obama. Melalui telepon percakapan tingkat tinggi, Obama dan Rouhani berbicara untuk pertama kali selama kurang lebih 30 tahun tidak melakukan komunikasi antar negara. Hal tersebut menandakan bahwa hubungan antar kedua negara berangsur membaik. Pada tahun 2015, Iran dengan beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Jerman menyepakati perjanjian jangka panjang program nuklir yang disebut dengan JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*). (Pangeran, 2020)

Pada pemerintahan Donald Trump, hubungan Iran dan Amerika Serikat kian memburuk. Sehingga pada puncak eskalasi konflik, atas perintah Presiden Donald Trump, sebuah pesawat tanpa awak menembakkan sebuah rudal yang menewaskan Mayor Jendral Qassem Soleimani pada 3 Januari 2020 di bandara Baghdad saat tengah malam. Rudal tersebut menghantam konvoi Hashed al-Shaabi dan menewaskan delapan orang, beberapa diantaranya yaitu kepala pasukan elit Quds Iran Jendral Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil komandan misil yang dikenal sebagai Mobilisasi Populer Pasukan (PMF). (Aoraha, 2020)

Rencana pembunuhan Jendral Qassem Soleimani telah muncul pada masa pemerintahan George W Bush dan Barack Obama, tetapi dalam kedua masa pemerintahan tersebut menganggap bahwa tindakan tersebut terlalu beresiko bagi Amerika maupun Iran dan bertentangan dengan beberapa prinsip dasar demokrasi Amerika. Tetapi, pada akhirnya rencana tersebut terealisasikan pada masa pemerintahan Donald Trump dengan berbagai resiko yang ada. Donald Trump menganggap bahwa tindakan

pembunuhan terhadap Jendral Qassem Soleimani merupakan tindakan yang ‘benar’. Walaupun Donald Trump merasa bahwa tindakannya tersebut ‘benar’, kenyatannya tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi Amerika.

Kongres Amerika tidak mengetahui mengenai adanya rencana pembunuhan terhadap orang terpenting kedua di Iran yaitu Jendral Qassem Soleimani. Dibawah aturan hukum Amerika Serikat Trump memiliki waktu sekitar 48 jam untuk menjelaskan rencana tersebut secara tertulis kepada kongres Amerika dalam dokumen rahasia. (English, 2020) Tindakan Trump dalam menjelaskan rencana pembunuhan terhadap Soleimani kepada kongres Amerika, mendapatkan tanggapan dari Nancy Pelosi bahwa pernyataan Trump kepada kongres lebih banyak menimbulkan pertanyaan dibandingkan jawaban. Sebagian besar pejabat Amerika Serikat menanggapi secara prihatin atas tindakan pembunuhan terhadap Jendral Qassem Soleimani. Salah satu yang diyakini oleh sebagian politisi demokrat Amerika yaitu, tindakan tersebut menyebabkan munculnya respons dari Iran.

Tindakan Trump untuk membunuh panglima tertinggi di Iran tersebut menimbulkan banyak perdebatan pemerintahan Amerika maupun dunia internasional. Salah satu perdebatan dari pemerintah Amerika mengenai keputusan yang diambil oleh Donald Trump untuk membunuh panglima tertinggi Iran Jendral Qassem Soleiman yaitu, dapat menimbulkan keprihatinan terhadap hubungan antara Amerika dan Iran yang akan menyebabkan terjadinya eskalasi konflik secara tidak terduga.

Selain munculnya tanggapan dari pemerintahan Amerika, beberapa tanggapan negatif datang dari berbagai

belahan dunia atas keputusan Amerika melakukan tindakannya terhadap jendral Qassem Soleimani. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab meminta untuk seluruh pihak yang terlibat, baik Amerika maupun Iran secepatnya melakukan deeskalasi. Tanggapan serupa datang dari juru bicara pemerintahan China yang menentang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. China pun menambahkan agar kedua belah pihak, khususnya Amerika untuk menahan diri dan mencegah adanya eskalasi ketegangan. Juru bicara kelompok Hamas Palestina, Bassem Naim memberikan tanggapan yang hampir serupa dengan mengatakan bahwa kematian Soleimani membuka seluruh peluang kemungkinan, kecuali ketenangan dan stabilitas. (Yulianingsih, 2020)

Atas tindakan Amerika terhadap pembunuhan Jendral Qassem Soleimani, Amerika mendapat teguran keras dari PBB. PBB mengelurakna laporan sepekan setelah Iran mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Donald Trump dan 35 orang lainnya terhadap pembunuhan jendral tertinggi Iran yaitu, Jendral Qassem Soleimani. Agnes Callamrd menyampaikan laporannya dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jeneva. Dalam laporan tersebut berisikan bahwa Amerika tidak memberikan bukti yang cukup kuat atas alasan tindakan pembunuhan terhadap Jendral Qassem Soleimani. Callmard pun menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Amerika melanggar hukum internasional dan prinsip demokrasi di Amerika Serikat. Selain Amerika, Iran pun mendapat teguran keras dari PBB atas serangan rudal yang dilancarkan nya sebagai balasan bagi Amerika Serikat. (Bruce, 2020)

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menetapkan pertanyaan pokok sebagai rumusan masalah

penelitian, yaitu: “*Mengapa Amerika Serikat melakukan tindakan pembunuhan terhadap panglima tertinggi Iran Jendral Qassem Soleimani?*”

1.4. Kerangka Teori

1. Konsep Deterrence

Strategi militer saat ini tidak bisa hanya digambarkan dalam konsep-konsep pertahanan (*defense*) dan penyerangan (*offense*). Para pemikir strategi harus mengembangkan istilah baru dan munculah konsep “deterens (*deterrence*)” yang dibedakan dengan istilah *defense*. Pertahanan bersifat fisik dan berfungsi saat perang pecah. Misalnya, tank bergerak ke garis depan, sehingga membuat musuh secara fisik tidak mungkin maju. Sedangkan deterens bersifat psikologis dan berfungsi sebelum perang terjadi. Ia membuat musuh tidak melakukan gerakan memulai perang. Bahkan, begitu perang terjadi maka deterens gagal dan harus digantikan oleh strategi pertahanan. (Mas'ood, 1990)

Tindakan yang dimaksudkan untuk pertahanan bisa juga menciptakan deterens. Misalnya, pedang yang kita pegang ketika menjaga uang, walaupun merupakan tindakan fisik tetapi bisa membuat seseorang yang mencuri uang tersebut menjadi resah. Penggabungan tindakan deterens dan pertahanan ini merupakan tindakan yang lumrah dalam bidang militer. Hanya saja seiring berkembangnya zaman, kedua fungsi tersebut dipisahkan. (Mas'ood, 1990). Dalam penelitian ini, konsep yang cocok digunakan untuk menarik hipotesa atas motif Amerika Serikat melakukan tindak pembunuhan terhadap Jendral Qassem Soleimani yaitu konsep *deterrence* atau pencegahan.

Menurut Robert Jervis, konsep *deterrence* atau pencegahan merupakan sebuah konsep yang muncul pada

masa Perang Dingin yang dapat menjelaskan fenomena yang terjadi pada masa tersebut. (Baylis, 2002) Prinsip dasar dari konsep pencegahan menurut Barry Buzan yaitu *“One actor prevents another from taking some action by raising the latter’s fear of the consequences that will ensue.”* (Buzan, 1987) Maksud dari prinsip dasar tersebut adalah negara sebagai actor berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatannya untuk menghadang lawan, atau setidaknya menekan lawan untuk berpikir kembali atas serangan yang akan dilakukannya.

Konsep deterrence atau pencegahan bisa diartikan pula sebagai bentuk penolakan untuk mempercayai pihak lain dengan asumsi bahwa pihak lain tersebut memberikan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan negara. Terdapat beberapa sarana yang bisa dilakukan dalam menerapkan konsep pencegahan yaitu menggunakan senjata pemusnah massal, kekuatan senjata konvensional, peningkatan kapabilitas militer, membentuk aliansi, sanksi ekonomi atau embargo, dan ancaman melakukan pembalasan.

Terdapat beberapa cara pengaplikasian konsep pencegahan bagi negara maupun aktor lain yang mempengaruhi keamanan maupun kepentingan suatu negara: (Barry, 2003)

1. Menjelaskan mengenai sanksi bagi aktor yang berusaha menyerang suatu negara, sehingga kepatuhan dapat menjadi opsi yang menarik bagi aktor yang menyerang.
2. Penjelasan mengenai sanksi dapat ditekankan dengan kejelasan hukum dan otoritas hukum yang jelas. Hal ini mampu meyakinkan musuh untuk patuh.

3. Bukan hanya sekedar mengancam musuh, tetapi berusaha menegakkan sanksi yang diberikan. Hal tersebut dapat mengurangi perlawanan dari musuh dan meningkatkan kepatuhan dengan melumpuhkan pelaku potensial.

Penjelasan dari beberapa cara pengaplikasian konsep mengacu kepada gagasan bahwa setiap negara maupun aktor lain akan mempertimbangkan keputusannya agar membuat aktor tersebut tidak merasa terancam. Sederhananya, yang mendasari konsep *deterrence* atau pencegahan ini adalah resiko bagi aktor yang mengancam harus dibuat sedemikian besar dengan konsekuensi yang berat, sehingga menimbulkan asumsi bahwa mereka akan mendapatkan lebih banyak kerugian dari berbagai macam aspek dibandingkan mendapat keuntungan dari tindakan yang mereka lakukan.

Terdapat dua jenis penerapan dalam konsep *deterrence* atau pencegahan yaitu *primary deterrence* dan *extended deterrence*. *Primary deterrence* bertujuan untuk mencegah potensial aggressor tidak menyerang negara deterrer atau melindungi negara sendiri agar tidak diserang oleh potensial aggressor. Sedangkan, *extended deterrence* bertujuan untuk mencegah potensial aggressor untuk negara deterrer, negara-negara sahabat deterrer, anggota aliansi atau negara-negara yang berada di bawah pengaruh deterrer. *Extended deterrence* atau pencegahan yang lebih luas merupakan elemen penting untuk manajemen keamanan regional dan global. (Morgan, 2012)

Konsep *deterrence* atau pencegahan, Penulis gunakan untuk mengidentifikasi motif Amerika Serikat dalam tindakan pembunuhan terhadap Jendral Qassem

Soleimani selaku panglima kedua tertinggi di Iran. Berdasarkan dengan pernyataan pribadi Donald Trump melalui konferensi pers dan hasil wawancara Mike Pompeo dengan beberapa media di Amerika, meyakini bahwa Jendral Soleimani memiliki rencana untuk menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dengan beberapa bantuan dari organisasi Islam Timur Tengah seperti, Hizbullah, Hamas dan Al-Houthi. Dengan tindakan pembunuhan Jendral Soleimani oleh Amerika Serikat atas keputusan Donald Trump, membuktikan bahwa Amerika Serikat ingin menunjukkan suatu ‘ancaman’ agar Iran tidak menggunakan kekuatan maupun aksi militer untuk menyerang Amerika Serikat.

Terbunuhnya Jendral Soleimani sebagai panglima tinggi kedua Iran oleh Amerika, menandakan bahwa Iran harus waspada terhadap segala tindak aksi militer yang akan dilakukannya untuk menyerang Amerika Serikat. Karena bila Iran berencana untuk menyerang Amerika Serikat, terdapat kemungkinan bahwa Amerika akan melakukan aksi militer sebagai bentuk pembalasan yang lebih besar terhadap Iran nantinya. Tindakan pembunuhan terhadap Jendral Soleimani merupakan salah satu cara Amerika untuk menghindari adanya perang antar kedua negara yang memungkinkan memiliki dampak terhadap dunia internasional.

Dalam penelitian ini, *primary deterrence* sangat tepat dikaitkan dengan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk melindungi pertahanan dan keamanan regionalnya. Selain tindakan pembunuhan Jendral Soleimani, Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*) yang telah disepakati

oleh Iran beserta kelima negara lainnya pada tahun 2015 dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran. Amerika menganggap JCPOA membuat Iran melancarkan pembentukan senjata nuklirnya yang suatu saat digunakan untuk menyerang Amerika Serikat dan menjadikan Iran sebagai negara yang memiliki potensial militer yang cukup besar di kawasan Timur Tengah. Pemberian sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika termasuk ke dalam salah satu sarana untuk melakukan pencegahan atas ancaman bagi negara nya

1.5. Hipotesa

Melalui uraian di atas, dapat ditarik hipotesa mengenai Alasan Amerika Serikat Melakukan Pembunuhan terhadap Jendral Qassem Soleimani, karena:

“Mencegah potensial Iran untuk tidak melakukan tindakan konfrontatif yang dapat mengancam keamanan regional Amerika Serikat.”

1.6. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian terhadap isu Amerika Serikat dan Iran dalam pembunuhan Jendral Qassem Soleimani adalah:

1. Untuk mendeskripsikan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran
2. Menerapkan teori-teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan di jurusan hubungan internasional
3. Mengkaji lebih dalam mengenai motif Amerika Serikat terhadap pembunuhan Jendral Qassem Soleimani
4. Untuk menjawab hipotesa mengenai motif Amerika Serikat terhadap pembunuhan Jendral Qassem Soleimani

1.7. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan kegiatan memperoleh data secara ilmiah untuk maksud ataupun tujuan tertentu. (Sugiyono, 2013). Subjek dari penelitian ini yaitu motif Amerika Serikat bagi kepentingan negaranya. Sedangkan objek dari penelitian ini yaitu peristiwa pembunuhan Jendral Qassem Soleimani selaku pemimpin tertinggi di Iran yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat pada awal tahun 2020. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif yang bersifat analitis. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan melalui literatur yang tersedia baik berupa buku, artikel, surat kabar maupun internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

Data yang diambil berupa data sekunder berupa pengumpulan data dari beberapa *website* resmi negara, dokumen yang sudah ada maupun penelitian yang sudah dilakukan akademisi lainnya sebagai acuan untuk data pelengkap.

1.8. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada alasan Amerika Serikat terhadap pembunuhan yang dilakukan kepada Jendral Qassem Soleimani pada tahun 2020. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai dari tahun 2017-2020. Tahun tersebut merupakan dimulainya masa jabatan presiden Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, menggantikan masa kepemimpinan Barack Obama. Dimana pada rentang waktu tersebut memutuskan untuk melakukan tindak pembunuhan terhadap Jendral Qassem Soleimani dibawah masa pemerintahan Donald Trump.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik dan aplikasi teori, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, berisikan elaborasi dari penjelasan latar belakang berupa hubungan Amerika Serikat dan Iran sebelum terjadinya tindak pembunuhan terhadap Jendral Qassem Soleimani.

Bab III, berisikan mengenai upaya Amerika Serikat dalam mencegah potensi ancaman Iran

Bab IV, berisikan penjelasan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan